

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, pemerintah di berbagai negara melakukan pembaharuan guna meningkatkan kualitas pemerintahan serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan melakukan digitalisasi pemerintahan. Sistem digital pemerintahan sangat terkait dengan transparansi pemerintahan sebagai salah satu karakteristik dalam mewujudkan *good governance* sebagaimana konsep yang ditawarkan United National Development Program (UNDP) (Antarini, 2020).

Di Indonesia sebagai salah satu Langkah mewujudkan *good government*, pemerintah pusat telah mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Didalam tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu aturan mengenai pengimplementasian kegiatan pemerintah sebagai pelayan publik yang tentunya harus memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu menunjang kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas. Tidak hanya pemerintahan pusat yang diarahkan untuk mengimplemetasikan pemerintahan digital, namun pemerintah daerah di Indonesia juga telah menerapkan bentuk pelayanan baru berupa *e-government* (pemerintahan elektronik) dan *e-services* (pelayanan secara elektronik) yang merupakan realisasi dari pemerintahan digital. Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan

wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Riswati, 2021).

Pelayanan publik yang dulunya masih dijalankan secara manual, sekarang perlu ditingkatkan dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru. Tentunya memanfaatkan sarana elektronik yang mengedepankan kualitas dan efisiensi dalam upaya pemerintah dalam pemenuhan kewajiban atas hak-hak dari masyarakat. Pelayanan publik dengan berbasis elektronik dapat mempercepat pekerjaan pemerintahan di setiap pemerintahan daerah di Indonesia (Novriando & Purnomo, 2020). Salah satu kekurangan pelayanan pemerintahan yang jadul tersebut dapat dilihat seperti penggunaan kertas yang sangat banyak dan lamanya waktu dalam pemberian layanan (Yuniantoro, 2019).

Pemerintah Kabupaten bulungan juga sudah menerapkan sistem pemerintahan digital (*e-government*) guna memperbaiki kualitas pemerintahannya dalam memberikan pelayanan publik dengan mengeluarkan sistem percepatan layanan administrasi berupa tanda tangan elektronik. Tanda Tangan Elektronik atau TTE ini sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Perbup No. 2 tahun 2020 tentang penyelenggaran SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Bulungan selain itu juga sebagai perbaikan dari lamanya proses pelayanan yang biasanya menghabiskan waktu 2-3 hari. Dengan adanya TTE hanya memerlukan waktu beberapa menit saja atau lebih efisien, mempermudah, mempercepat serta menjadi solusi dalam menangani masalah pelayanan publik, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, dimana narasumber Bapak Herry Sujana, S.Kom. M.A.P

selaku yang bertanggung jawab terkait program Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Bulungan, menjelaskan terdapat indikasi bahwa dalam proses pembuatan perizinan sering kali tertunda atau membutuhkan waktu yang lama akibat menunggu proses Tanda Tangan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan khususnya bidang Persandian melakukan kerja sama dengan pihak BSSN untuk mengeluarkan sertifikat elektronik, yang mana di dalamnya termasuk tanda tangan elektronik. Percobaan awal penerapan tanda tangan elektronik untuk perizinan dinilai efektif untuk mempercepat proses perizinan. Selain itu terindikasi bahwa dalam proses administrasi lainnya seperti surat menyurat juga membutuhkan waktu yang lama dalam proses tanda tangan. Sehingga sertifikat elektronik dan tanda-tangan elektronik dikembangkan untuk OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar membantu proses pelayanan administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan kebutuhannya, penerapan TTE ini ditujukan tidak hanya untuk mempercepat waktu pemberian tanda tangan, namun juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keamanan terhadap privasi, menghemat anggaran, mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kepuasan publik. TTE dikelola dan dinaungi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan dan pada implementasinya juga bekerja sama dengan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Selain itu adanya TTE diharapkan juga menjadi salah satu program pemerintahan elektronik yang dapat membantu meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bulungan, karena TTE merupakan salah satu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan juga menjadi salah satu sistem keamanan SPBE menurut Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 khususnya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan Tanda Tangan Elektronik juga termasuk dalam 15 program prioritas.

Untuk Kabupaten Bulungan, menurut hasil survey oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memiliki indeks SPBE sebesar 2,10 dengan predikat cukup. Adapun Nilai indeks penerapan SPBE dikelompokkan menjadi empat kategori predikat, antara lain: memuaskan (4,2 - 5,0), sangat baik (3,5 - <4,2), baik (2,6 - <3,5), cukup (1,8 - <2,6) dan kurang (<1,8). Indeks SPBE Kabupaten Bulungan juga masih tertinggal oleh Kota Tarakan dengan Indeks SPBE 2,20.

Gambar 1. 1 Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2021

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2,38	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bulungan	2,10	Cukup
3.	Pemerintah Kota Tarakan	2,20	Cukup

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021.

Namun demikian, dalam proses atau hasil dari implementasi pemerintahan masih menjadi kelemahan atau hambatan dari implementasi pemerintahan digital disampaikan Musfika, (2018) faktor penghambat penerapan e-government adalah kurangnya anggaran yang ada karena tingginya biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, infrastruktur, dan pelatihan terhadap pekerja di bagian layanan IT. Selain itu kelemahan lainnya menurut Firdaus et al., (2021) transformasi birokrasi pemerintah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi pemerintahan digital.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan tahun 2022?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh anggaran, birokrasi dan akuntabilitas terhadap tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan tahun 2022
- 1.3.2 Menguji pengaruh anggaran, birokrasi dan akuntabilitas terhadap tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus tanda tangan di Kabupaten Bulungan tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital. Terfokus kepada pengaruh faktor anggaran, birokrasi dan akuntabilitas dalam implementasi pemerintahan digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas anggaran, birokrasi dan akuntabilitas sebagai faktor mensukseskan implementasi pemerintahan digital terutama bagi program tanda tangan elektronik.

1.5 Kajian Pustaka (literature review)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital di Indonesia dapat diklasifikasikan (taksonomi) sebagai berikut:

- 1) Heny & Nurdin, (2018) dalam tulisannya Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan e-government, mendeskripsikan penerapan e-government dalam peningkatan pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan data skunder yang didasari hasil penelitian dan mencakup pendapat para ahli terkait permasalahan. Dari penelitian

ini disimpulkan bagi pemerintah dalam implementasi e-government diperlukannya pengukuran tertentu agar mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk melayani warga lebih baik.

- 2) RURU & RULLY, (2021) meneliti mengenai Implementasi Digital Government Smart City Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini di dapatkan hambatan dalam implementasi smart city di Kota Mando. Salah satunya adalah ketidak siapan ASN dalam menjalankan smart city ini. Penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan IT sehingga mempengaruhi kemampuan dari ASN dalam memahami dan melaksanakan program yang ada.
- 3) Ketidaksiapan sumber daya manusia atau ASN menjadi salah satu kekurangan atau hambatan pemerintahan digital, juga disampaikan Riswati, (2021) dalam penelitiannya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Dari penelitiannya menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, kurangnya dukungan sarana dan prasarana lainnya, terkhusus jaringan koneksi internet, yang masih lemah, sehingga mengganggu dalam implementasi pemerintahan digital.
- 4) Persiapan ASN juga bukan lagi tentang kualitas kemampuan penguasaan teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas ASN agar terhindar dari spoil system di era oemerintahan digital. Rahardi et al.,

(2020) dalam penelitiannya Spoil System Sebagai Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan penjelasan bahwa di Indonesia masih menemukan permasalahan, tantangan dan peluang munculnya spoil system. Secara garis besar peningkatan kualitas ASN di era digitalisasi memerlukan perencanaan yang terstruktur dan efisien dalam rangka meminimalisir peluang intervensi dari luar sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Agar terjalankannya birokrasi yang baik, dan memiliki akuntabilitas guna mensukseskan pemerintahan digital.

- 5) Dalam tulisannya Antarini, (2020) Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) memaparkan hasil bahwa menerapkan sistem digital dapat mendorong peningkatan aspek efektifitas dan efisiensi kerja. Dengan adanya sistem digital juga mampu memberikan ruang transparansi yang akhirnya dapat mendorong sikap responsif dari para penyelenggara pemerintahan daerah, serta masyarakat juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) untuk memperoleh layanan lebih baik lagi dari aparat pemerintah daerah.
- 6) Berkaitan dengan Digital Local Government Susanty,(2021) meneliti mengenai implementasi dan keberlanjutan dari aplikasi SILPa KAMI di Kota Cimahi. Selain itu juga penelitian ini bertujuan melihat karakteristik daerah seperti apa yang dapat mengadopsi aplikasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang

dimana menghasilkan temuan bahwa implementasi aplikasi SILPA KAMI berjalan dengan baik karena dinilai telah memenuhi berbagai faktor sukses implementasi e-government. Aplikasi ini juga tetap berjalan walaupun masih menemui kendala dalam penerapannya.

- 7) Yunas,(2020) dalam penelitiannya Implementasi E-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mendapatkan hasil bahwa transformasi digital yang dilakukan guna mendukung e-government telah dijalankan dengan baik dan mengurangi potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.
- 8) Salah satu inovasi pemerintahan digital guna mendukung terciptanya good government disampaikan Sofianto, (2019) dalam penelitiannya Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, mendapatkan hasil inovasi manajemen pemerintahan berupa aplikasi GRMS telah yang telah dijalankan, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan masih memiliki kendala salah satunya adalah kesiapan aparat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital.
- 9) Menurut Firdaus et al., (2021) dalam penelitiannya Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia yang menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, mendapatkan hasil bahwa

adanya transformasi birokrasi pemerintah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi birokrasi digital.

- 10) Menurut Arifah , (2020) dalam penelitiannya Transformasi Birokrasi Melalui E-Government dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mendapatkan hasil kinerja dalam pelaksanaan e-government di Indonesia perlu ditingkatkan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintahan. Selain perlunya memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi, perlu juga didukung oleh integritas yang baik oleh perumus maupun pelaksana dalam menjalankn e-government.
- 11) Tulungen et al.,(2022) dalam penelitian Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital Digital Transformation dengan metode penelitian kualitatif mendapatkan hasil bahwa membangun kempimpinan digital merupakan hal yang sangat penting atau krusial dalam mewujudkan transformasi digital.
- 12) Menurut Maita & Sari, (2019) dalam penelitiannya Pengaruh Penyusunan Anggaran Dan Implementasi E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Kota Padang, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif mendapatkan hasil bahwa anggaran mempengaruhi secara signifikan kinerja aparatur pemerintahan dalam implementasi e-governement.
- 13) Mengkaji hal yang sama yaitu mengenai aggaran atau budgeting Andriyanto et al., (2019) dalam penelitiannya Anteseden Perilaku Penggunaan E-Budgeting: Kasus Sistem Informasi Keuangan Desa di

Banyuwangi, Indonesia dengan metode kuantitatif, mendapatkan hasil ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan sistem e-village budgeting oleh aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

14) Masih dengan kajian mengenai anggaran atau budgeting, menurut Nasution & Atika, (2019) dalam penelitiannya Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif bahwa peranan sistem e-budgeting dalam upaya meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah Kota Binjai telah tercapai.

15) Menurut Musfekar, (2018) pada penelitiannya Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan implementasi e-government seperti Skill dan keahlian penggunaan IT, integrasi e-government dan harga teknologi yang dibutuhkan.

Namun penelitian-penelitian terdahulu masih sangat kurang memperhatikan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi implementasi pemerintahan digital, seperti faktor anggaran, birokrasi dan akuntabilitas. Beberapa penelitian diatas juga hanya membahas sebatas bagaimana jalannya implementasi pemerintahan digital dan masih belum

fokus kepada beberapa faktor spesifik yang mungkin mempengaruhi implementasi pemerintahan digital.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Heny & Nurdin, (2018), RURU & RULLY, (2021), Riswati, (2021), Rahardi et al., (2020), Antarini, (2020), Susanty,(2021), Yunas,(2020), Sofianto, (2019), Firdaus et al., (2021), Arifah , (2020), Tulungen et al.,(2022), Maita & Sari, (2019), Andriyanto et al., (2019), Nasution & Atika, (2019), Musfikar, (2018). Penelitian ini fokus mencari dan membahas mengenai faktor yang diduga mempengaruhi implementasi pemerintahan digital. Adapun faktor tersebut yaitu keuangan, birokrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan di tahun 2022.

1.6 Kerangka Teoretik

1.6.1 Pemerintahan Digital

Pemerintahan digital (*digital government*) adalah salah satu reformasi sistem pelaksanaan pemerintahan yang mulai diterapkan diberbagai negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk Indonesia (RURU & RULLY, 2021). Implementasi pemerintahan digital lebih sering kita kenal dengan *e-government*. Yang dimana menurut Muliawaty & Hendryawan, (2020) *e-government* merupakan aktivitas atau program yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan (Riyadi, 2019) bahwa (e-government) merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi pemerintahan; (2) memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (3) memberikan akses informasi kepada publik secara luas; dan (4) menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab. Dalam menunjang keberhasilan implementasi pemerintahan digital menurut Riswati,(2021) adapun factor pendukungnya, yaitu:

1. Ketercukupan Urusan

Ketercukupan urusan ini penting agar terciptanya sebuah efisiensi, kejujuran serta kebijaksanaan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan terlaksananya implementasi dengan baik, ketercukupan membuat urusan pemerintahan menjadi terwujud dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas.

2. Kecerdasan Teknologi

Adanya pemerintahan berbasis digital haruslah mampu menghadirkan teknologi untuk menyelesaikan bentuk problematika yang ada di masyarakat. Sehingga diharapkan pelayanan pemerintah bisa meningkatkan kepuasan public dibandingkan pemerintahan berbasis manual.

3. Integrasi Antar Instansi Pemerintah

Keberhasilan dalam implementasi pemerintahan digital juga memerlukan sebuah kerja sama atau integrasi antar stakeholders pemerintahan. Adanya kerja sama ini mempermudah dalam proses pelaksanaan, antar stakeholders mampu memberikan bantuan, dukungan baik berupa sumber daya hingga teknologi agar menghardikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

4. Ketepatan Hasil Kerja

Ketepatan hasil kerja ini diperlukana agar dapat melihat sejauh mana implementasi pemerintahan digital itu berjalan.

1.6.2 Anggaran (variabel X1)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi dengan fungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selain itu, anggaran merupakan parameter estimasi kinerja yang hendak dicapai selama masa waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dapat diartikan sebagai artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat (Ramadhani & Setiawan, 2019).

Anggaran sangat dibutuhkan dalam menunjang implementasi pemerintahan digital. Namun dalam prosesnya penggunaan anggaran harus terukur secara jelas. Menurut Hariadi, (2021) Adapun indikator yang

digunakan dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sebuah lembaga yaitu menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 /Pmk.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Hariadi, (2021) menjelaskan IKPA melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja, dengan indikator antara lain:

1. Kecukupan Dana/Anggaran

Kecukupan dana termasuk kedalam efektivitas pelaksanaan anggaran dimana tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan

1.6.3 Birokrasi (variabel X2)

(Ramadhanti, 2018) mengemukakan bahwa ada empat macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini :

- 1) Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat oleh para penguasa untuk menjalankan pemerintahan (*government by bureaus*)

- 2) Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi)
- 3) Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi
- 4) Birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan.

Selain itu menurut (Ramadhanti, 2018) birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. (Ambarwati, 2018) menjelaskan birokrasi dalam implementasi pemerintahan digital adalah sebuah bentuk struktur administrasi tertentu yang bekerja berdasarkan otoritas yang berorientasi legal dan peran dengan bercirikan sebagai berikut:

1. Birokrasi *piramidal* atau terdapat hirarki secara administratif. Dimana adanya kesesuaian dari pihak atasan kepada bawahan guna mengorganisir secara teratur melalui sebuah sistem guna mencapai tujuan tertentu.
2. Fleksibilitas proses operasional
Fleksibilitas dalam sebuah proses operasional bermanfaat pada sebuah organisasi. Hal tersebut dapat memudahkan dalam pekerjaan dan juga meningkatkan kepuasan kerja.

3. Spesialisasi pekerjaan atau terdapat pembagian kinerja yang sesuai dengan kemampuan. Spesialisasi pekerjaan dilakukan agar setiap tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan maksimal dan efektif tanpa harus melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya.

1.6.4 Akuntabilitas (variabel X3)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan sebuah wewenang yang telah di berikan (Verdania Latif, 2021). Menurut Nasution & Atika, (2019) mengartikan akuntabilitas sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang, selain itu akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam menunjang implementasi pemerintahan digital, akuntabilitas menurut Syah, (2018) dan Budiman, (2019) harus mencakup antara lain

1. Kesesuaian dengan Kebutuhan Pelayanan

Hal ini perlu agar pemerintah sebagai pelaksana dapat mempertanggungjawabkan urgensi dari dibentuknya program tersebut dan mengukur efektivitas dari program yang dijalankan, apakah telah sesuai dengan kebutuhan yang ada dan apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan sesungguhnya.

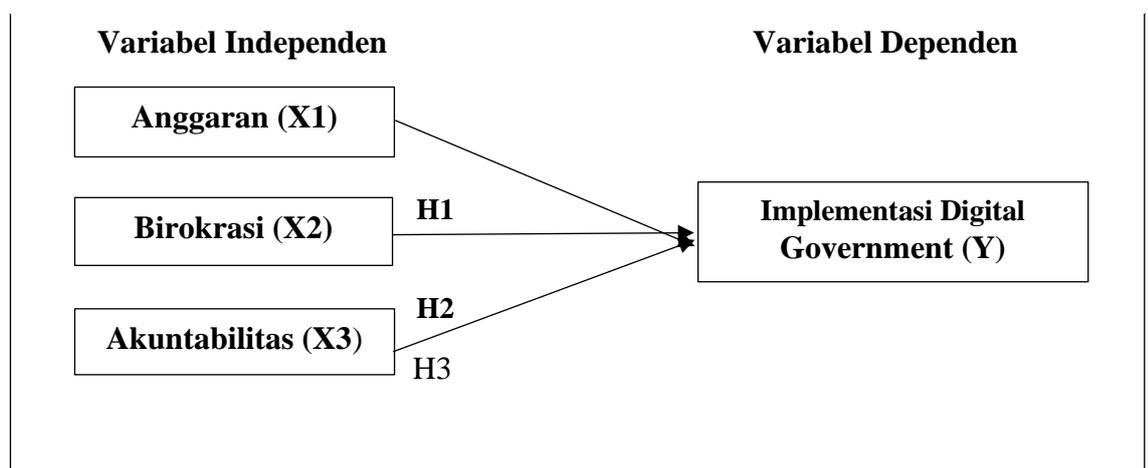
2. Proteksi data

Akuntabilitas dalam pemerintahan digital atau elektronik juga perlu memiliki perlindungan data pribadi pengguna atau data user. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kebocoran data sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengguna maupun pelaksana. Dengan menjaga kerahasiaan data pengguna akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga akan terus berpartisipasi untuk menggunakan layanan berbasis online yang disediakan pemerintah agar terciptanya efisiensi dan efektifitas pada masyarakat dan pemerintah.

3. Interaksi antara pemerintah dan stakeholders.

Hal ini tercakup dalam laporan output maupun outcome, sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksana atau pemerintah kepada para stakeholders yang ada. Karena dalam proses implementasi pemerintahan, pemerintah digital, pemerintah tidak hanya bekerja sendiri tapi juga memiliki interaksi dan kerjasama dengan stakeholders lainnya.

Gambar 1. 2 Kerangka Teoritik/Model Penelitian



Keterangan:

- X1 adalah variable independent ke-1
- X2 adalah variable independent ke-2
- X3 adalah variable independent ke-3
- Mempengaruhi Y
- Y adalah variable dependen/endogen
- H adalah hipotesa/dugaan

1.7 Hipotesa

- 1.7.1 Anggaran mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
- 1.7.2 Birokrasi mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
- 1.7.3 Akuntabilitas mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.

1.8 Definisi Konsep dan Operasional

1.8.1 Definisi Konseptual

1.8.1.1 Implementasi Pemerintahan Digital

Implementasi pemerintahan digital adalah sebuah bentuk transformasi pelaksanaan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.

1.8.1.2 Anggaran

Anggaran merupakan parameter estimasi kinerja yang hendak dicapai selama masa waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dapat diartikan sebagai artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat

1.8.1.3 Birokrasi

Birokrasi adalah hubungan di dalam sebuah organisasi pemerintahan yang dimana satu dengan lainnya memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan. Hal ini tentu saja dalam rangka mencapai sebuah visi, misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan.

1.8.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban yang dilakukan organisasi atau perorangan dalam pertanggungjawaban wewenang maupun tugas yang telah diberikan.

1.8.2 Definisi Oprasional

1.8.2.1 Indikator Implementasi Pemerintahan Digital

- 1) Ketercakupan urusan
- 2) Kecerdasan teknologi
- 3) Integrasi antar instansi pemerintahan
- 4) Ketepatan hasil kerja.

1.8.2.2 Indikator Anggaran

- 1) Kecukupan Dana/Anggaran

- 2) Efisiensi perencanaan anggaran

1.8.2.3 Indikator Birokrasi

- 1) Birokrasi piramidal
- 2) Fleksibilitas proses oprasional
- 3) Spesialisasi pekerjaan

1.8.2.4 Indikator Akuntabilitas

- 1) Kesesuaian dengan Kebutuhan Pelayanan
- 2) Proteksi Data
- 3) Interaksi antara pemerintah dah stakeholder

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh keuangan, birokrasi dan akuntabilitas terhadap implementasi digital government, maka bertipe sebagai penelitian survey. Penelitian survey merupakan salah satu bentuk penelitian kuantitatif yang dimana penelitian survei merupakan bentuk penelitian dengan mengumpulkan data atau hasil informasi dari suatu sampel dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk angket atau wawancara untuk menjelaskan maupun menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi (Maidiana, 2021).

1.9.2 Populasi dan Sample

Menururt Sugiyono (2017) populasi adalah jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Kristianti et al., 2021). Adapun Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang mengimplementasikan pelayanan tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan tahun 2022. Total populasi dalam penelitian ini adalah 128 pegawai yang terdiri dari Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan jumlah pegawai yaitu berjumlah 24 pegawai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan jumlah pegawai 29 pegawai, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKP) dengan 31 pegawai dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan 44 pegawai. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Vista Yuliantika, 2018).

Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik pengambilan sampling dengan jenis simple random sampling. Menurut Sugiyono (2017) Teknik simple random sampling ini merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Vista Yuliantika, 2018). Teknik ini digunakan karena sifat populasinya homogen, yakni khusus para pegawai yang mengimplementasikan pelayanan tanda tangan elektronik di Kabupaten Bulungan. Agar lebih representatif, penelitian ini mengambil 104 sampel (responden), dari populasi yang berjumlah 128 pegawai yang turut serta mengimplementasikan tanda tangan elektronik tersebut. Berikut merupakan tabel Teknik pengambilan data dalam penelitian ini:

Gambar 1. 3 Tabel Teknik Pengambilan Sample

Population	Confidence level 90 per cent			Confidence level 95 per cent			Confidence level 99 per cent		
	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence
30	27	28	29	28	29	29	29	29	30
50	42	45	47	44	46	48	46	48	49
75	59	64	68	63	67	70	67	70	72
100	73	81	88	79	86	91	87	91	95
120	83	94	104	91	100	108	102	108	113
150	97	111	125	108	120	132	122	131	139
200	115	136	158	132	150	168	154	168	180
250	130	157	188	151	176	203	182	201	220
300	143	176	215	168	200	234	207	233	258
350	153	192	239	183	221	264	229	262	294
400	162	206	262	196	240	291	250	289	329
450	170	219	282	207	257	317	268	314	362
500	176	230	301	217	273	340	285	337	393
600	187	249	335	234	300	384	315	380	453
650	192	257	350	241	312	404	328	400	481
700	196	265	364	248	323	423	341	418	507
800	203	278	389	260	343	457	363	452	558
900	209	289	411	269	360	488	382	482	605
1,000	214	298	431	278	375	516	399	509	648
1,100	218	307	448	285	388	542	414	534	689
1,200	222	314	464	291	400	565	427	556	727
1,300	225	321	478	297	411	586	439	577	762
1,400	228	328	491	301	420	606	450	596	796
1,500	230	331	503	306	429	624	460	613	827
2,000	240	351	549	322	462	696	498	683	959
2,500	246	364	581	333	484	749	524	733	1,061
5,000	258	392	657	357	536	879	586	859	1,347
7,500	263	403	687	365	556	934	610	911	1,480
10,000	265	408	703	370	566	964	622	939	1,556
20,000	269	417	729	377	583	1,013	642	986	1,688
30,000	270	419	738	379	588	1,030	649	1,002	1,737
40,000	270	421	742	381	591	1,039	653	1,011	1,762
50,000	271	422	745	381	593	1,045	655	1,016	1,778
100,000	272	424	751	383	597	1,056	659	1,026	1,810
150,000	272	424	752	383	598	1,060	661	1,030	1,821
200,000	272	424	753	383	598	1,061	661	1,031	1,826
250,000	272	425	754	384	599	1,063	662	1,033	1,830
500,000	272	425	755	384	600	1,065	663	1,035	1,837
1,000,000	272	425	756	384	600	1,066	663	1,036	1,840

Sumber : (Cohen et al., 2018)

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah berupa kuesioner (angket). Kuesioner (angket) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya ba (Vista Yuliantika, 2018). Jadi penelitian ini menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang menjadi sampel (responden) penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk google form. Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*).

Untuk melengkapi penelitian ini, juga digunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara dan dokumentasi. Yang dimana akan dilakukan wawancara dengan staf Dinas Komunikasi,

Informatika Dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan yang bertanggung jawab terkait pengelolaan, perencanaan dan penerapan tanda tangan elektronik tersebut yang diperuntukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selain itu juga mendapatkan dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lain-lain yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital (*digital government*)

1.9.4 Instrumen dan Pengukuran data Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner tertutup dimana pernyataan yang membawa responden ke jawaban alternatif yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan (Wirajaya Kusuma, 2021). Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur, dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif (Janna, 2020).

Penelitian ini menggunakan Skala Likert untuk pengukuran datanya. Menurut Sugiyono skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat responden tentang fenomena sosial (Wirajaya Kusuma, 2021). Skala *Likert* digunakan untuk menentukan pendapat responden dalam kuesioner, yaitu :

1. Sangat Setuju (memiliki nilai 5)
2. Setuju (memiliki nilai 4)

3. Netral (memiliki nilai 3)
4. Tidak Setuju (memiliki nilai 2)
5. Sangat Tidak Setuju. (memiliki nilai 1)

1.9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik Analisa atau analisis data adalah cara yang digunakan untuk memperhitungkan jawaban rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, Sugiyono juga menjelaskan bahwa proses dalam menggunakan teknik analisis berupa pencarian data, penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan menjabarkan secara mengelompokkan data dalam beberapa kategori atau unit-unit, Menyusun pola untuk menentukan data krusial yang harus dipelajari, melakukan sintesis, dan menyimpulkan data yang sudah dikelompokkan secara tersusun sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2018)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan aplikasi Smart PLS yang dioperasikan dengan memakai media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang mana secara simultan dapat melakukan pengujian contoh model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memasukkan variabel-variabel yang tidak dapat diamati (*unobservable*) namun hanya diukur secara tidak langsung oleh variabel-variabel indikator atau variabel laten (Juliandi, 2018).

SEM (*Structural Equation Modeling*) digunakan untuk menghitung fenomena yang terdapat di lapangan & menguji hipotesis/ kebenaran yang telah diperkirakan sebelumnya dimana sebuah evolusi dari model persamaan berganda (regresi) yang dikembangkan menurut prinsip ekonometri & digabungkan menggunakan prinsip pengaturan (analisis faktor). Reliabilitas alat pengumpulan data pada dasarnya memperlihatkan tingkat ketetapan alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilaksanakan di waktu-waktu yang berbeda (Vista Yuliantika, 2018).

Uji Regresi merupakan salah satu metode untuk menentukan adakah hubungan sebab-akibat antara variabel dengan variabel lainnya yang diujikan atau dapat dikatakan digunakan untuk mengestimasi nilai dari suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya yang disebut variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) (Vista Yuliantika, 2018). Sedangkan uji hipotesa adalah suatu proses evaluasi kekuatan sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait populasinya untuk nanti diketahui apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima.